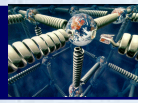
Bab IX Kebijakan Pemerintah dalam IT





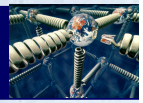
Dr. Yeffry Handoko Putra, M.T

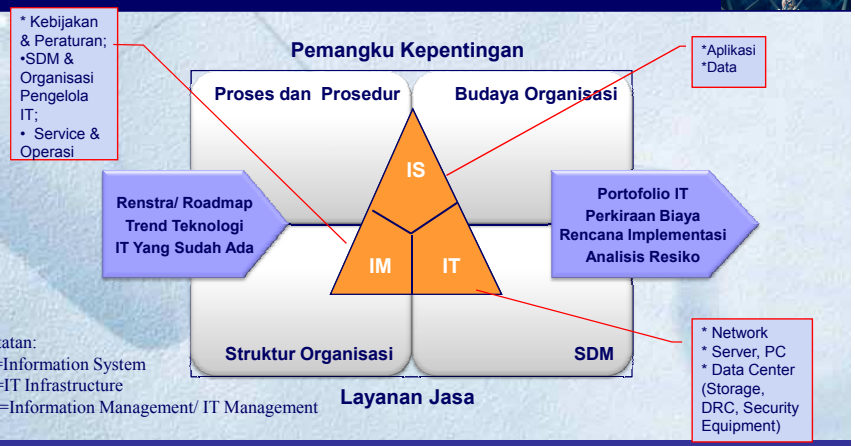
Beberapa Regulasi Publik



- INPRESS No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Pengembangan electronic government (e-gov)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik

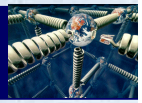
Tiga Aspek IT Master Plan





Catatan:
IS=Information System
IT=IT Infrastructure
IM=Information Management/ IT Management

Tiga Aspek ICT



1. Aspek Information System (IS); Merupakan definisi secara jelas dan terperinci dari Program Aplikasi sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan.
2. Aspek Infrastruktur IT (IT) ; Meliputi komponen-komponen perangkat keras (PC, Server, Data Center, Infrastruktur Jaringan, Bandwidth Komunikasi Data) dan perangkat lunak sistem (sistem operasi, sistem database, firewall, dan lain-lain) yang harus tersedia untuk mendukung Sistem Informasi yang telah didefinisikan pada Aspek IS.
3. Aspek IT Manajemen (IM) ; menyangkut hal-hal tata kelola ICT yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
   - Kebijakan (policy), Sistem operasi dan Regulasi (Prosedur, peraturan)
   - Manajemen Resiko
   - Manajemen SDM
   - Operasional ICT (Service Support) dan Layanan Jasa ICT (Service Delivery)

Pentingnya Aspek IM

- **Gatner 2003 :**
  - "Tujuh puluh lima persen (75%) Proyek IT gagal diimplementasikan. Sebagian besar kegagalan tersebut karena tidak menerapkan IT Management (policy and regulation)"
- **Hasil survei tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini di Indonesia.**

Analogi Aspek Infrastruktur IT (Disingkat IT)





Analogi Aspek Information System (IS)

- **Information System (aplikasi) -> Kendaraan yg berjalan diatas jaringan jalan**

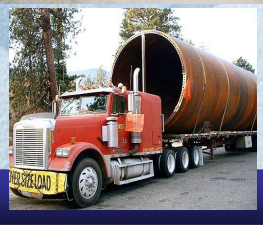




Analogi Aspek Information System (IS)

- **Information System (data) -> muatan diatas kendaraan**







Analogi Aspek IT Management (IM)

- IT Management -> Peraturan, rambu-rambu, skill & kemampuan Pengemudi, Trayek





Contoh Kebijakan di sektor publik

- Penambahan Video Conference
- Pembangunan VPN-IP/MPLS
- Pengadaan Sever dan Printer di
- Uji Coba Aplikasi MDK
- Pembangunan Disaster Recovery Center
- Pengadaan Backup Internet Connection
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Geographis (SIG)
- Pegembangan Aplikasi Balanced Score Card (BSC)
- Pengembangan Aplikasi E-recruitment
- Pengembangan Aplikasi Help_Desk (Pusat)
- Peningkatan Kualitas Program Aplikasi Statistik Rutin

Contoh Kebijakan di sektor riil

- Penguatan Infrastruktur (Security system)
  Pembanguna Network Monitoring System (NMS)
  Public Connectivity (VPN/Dial)
- Pengembangan System
  Desentralisasi/Distributed Pengolahan
  e-Procurement
  Advanced e-Learning
  Pengembangan Program Aplikasi Statistik Rutin
- Pengembangan Data Center
  Pemaduan Database on-line dan Statistik rutin dalam warehouse

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

- RUU Tindak Pidana TI
- RUU ITE
- RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
- UU Perlindungan Konsumen
- UU Telekomunikasi
- UU No.12 / 2002 tentang Hak Cipta
- UU No.14 / 2001 tentang Paten
- UU No.15 / 2001 tentang Merek
- UU Money Laundring
- UU Kedokteran
- UU Penyiaran

ACUAN PERUNDANGAN DARI LUAR NEGERI :

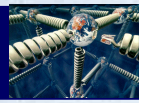


UETA
Electronic Sign 2001 (UNCITRAL)
CyberCrime Act 2001 USC Code Tittle 18 (1029, 1030)
Children Online Privacy Protection Act
ETA of Singapore
Convention on Cyber Crime (OECD)
UNCITRAL Model Law on E-Commerce
Resolusi PBB Nomor 55/63
Dll.

Pilar Utama Layanan Pemerintah

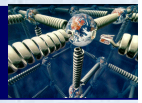
- (1) pencerdasan masyakat (*educating people*),
- (2) penyejahteraan masyarakat (*prospering people*),
- (3) perlindungan masyarakat (*protecting people*), dan
- (4) pelayanan masyarakat (*serving people*).

Apakah Layanan Prima?



- Cepat
- Mudah
- Murah
- Adil
- Mudah
- Ramah
- Akurat
- Konsisten
- Siapa saja, di mana saja, kapan saja

What is E-Gov?



- ***e-Government** refers to the use of internet technology as a platform for exchanging information, providing services and transacting with citizens, businesses, and other arms of government.*
- ***e-Government**:* pendayagunaan teknologi informasi (TI) untuk transformasi proses bisnis pemerintahan agar dapat menigkatkan layanan terhadap masyarakat

E-Gov: Re-engineering of Governmental Business Process

- Michael Hammer & James Champy tentang peran TI bagi organisasi:

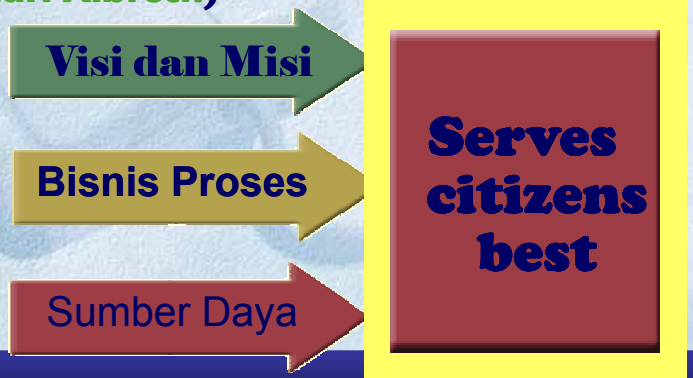
"company that cannot change the way it thinks about Information Technology (IT) cannot re-engineer"

Pengembangan & Penerapan E-Gov

- Perubahan paradigma pemerintahan
- Identifikasi kebutuhan prioritas masyarakat
- Formulasi layanan publik
- Pegembangan infrastruktur
- Implementasi & regulasi
- Internalisasi

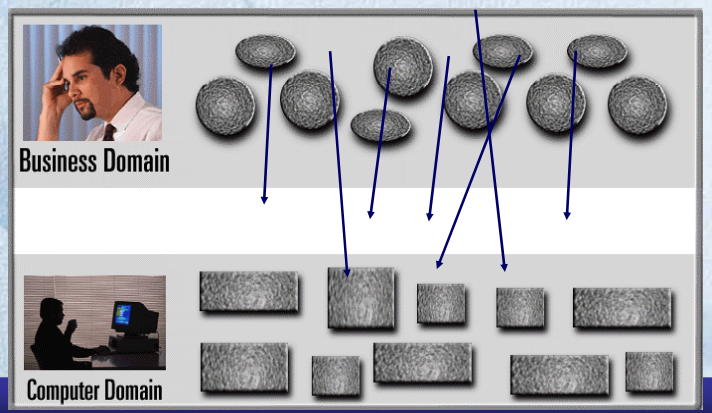
Paradigma E-Gov

A *paradigm* is a mental frame of reference that dominates the way people think and act (Karl Albrech)

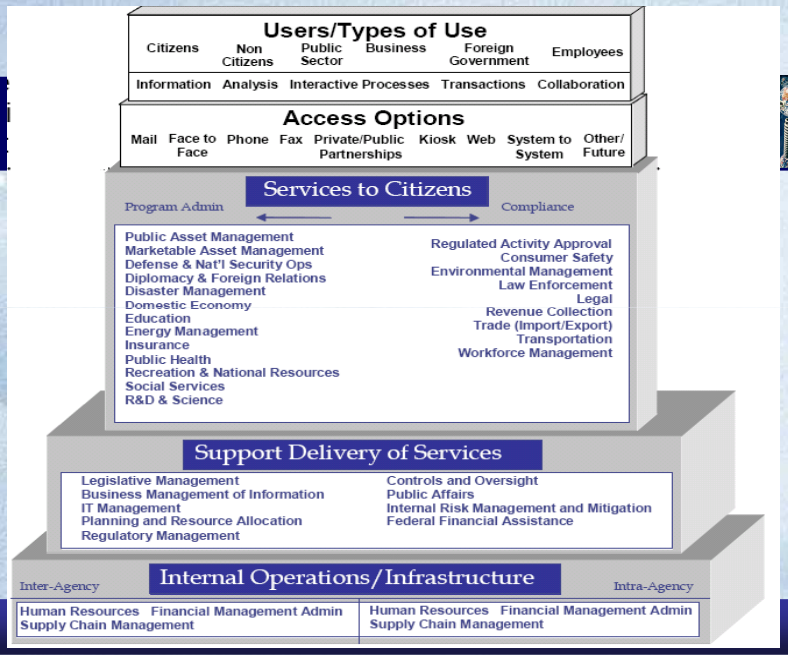


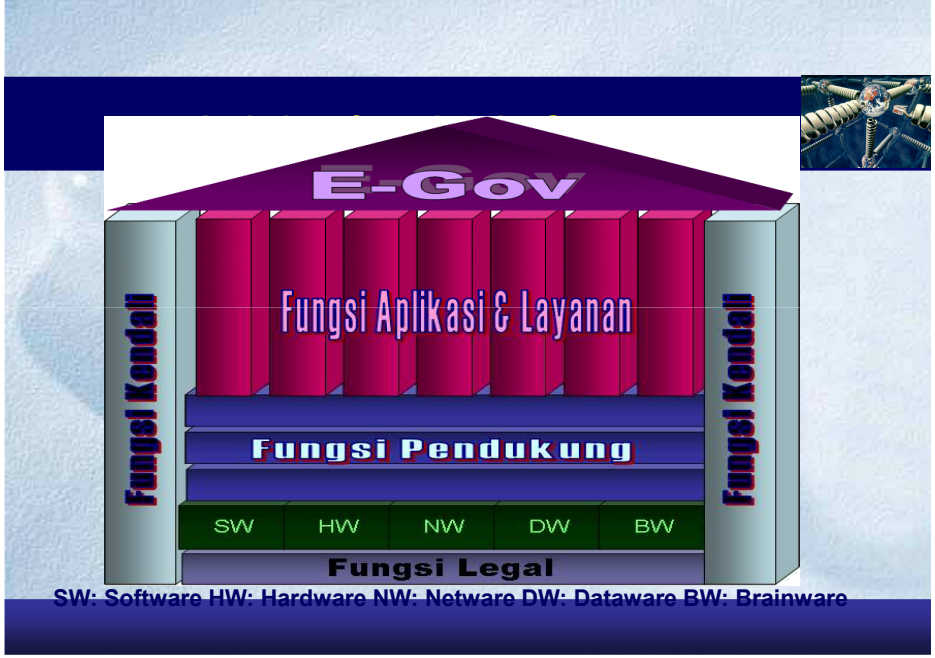
Analisis Kebutuhan Masyarakat

- Think and conceptualize business objects and logic
- Identify information needed → then what data are needed
- Formulate services (applications) are needed?



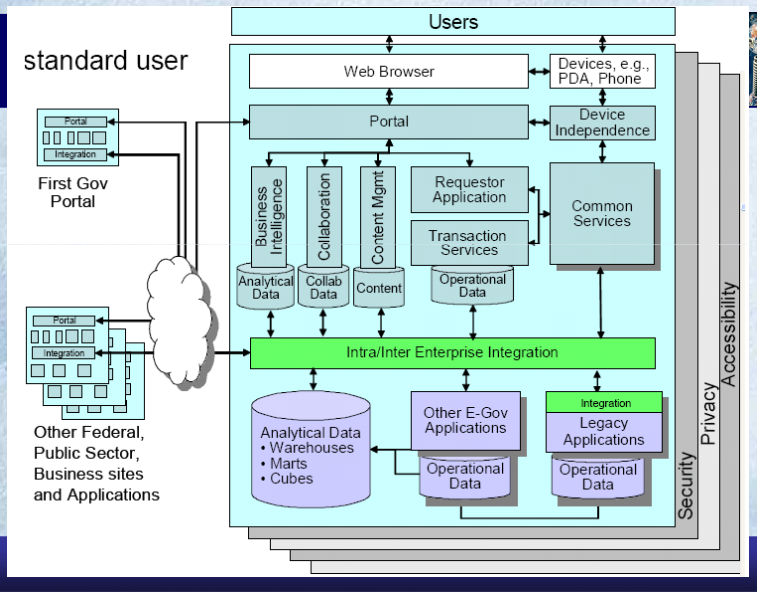
Contoh Arsitektur Bisnis Pemerintahan (FEA Working Group 2002)



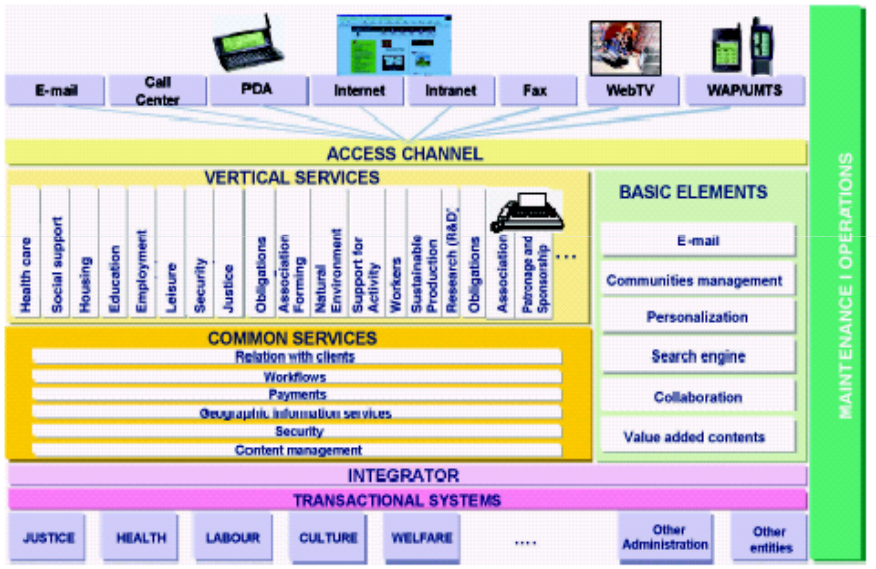


SW: Software HW: Hardware NW: Netware DW: Dataware BW: Brainware

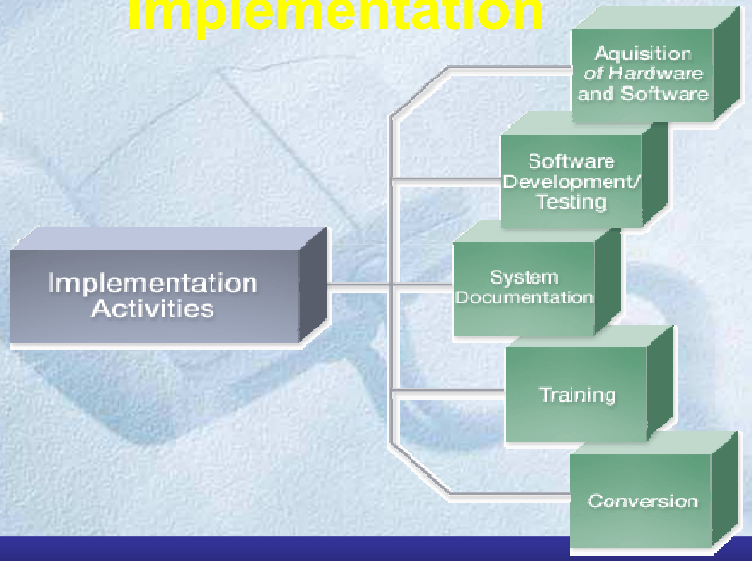
Contoh arsitektur TI untuk e-gov oleh Federal Enterprise Architecture (FEA) Working Group (2002)



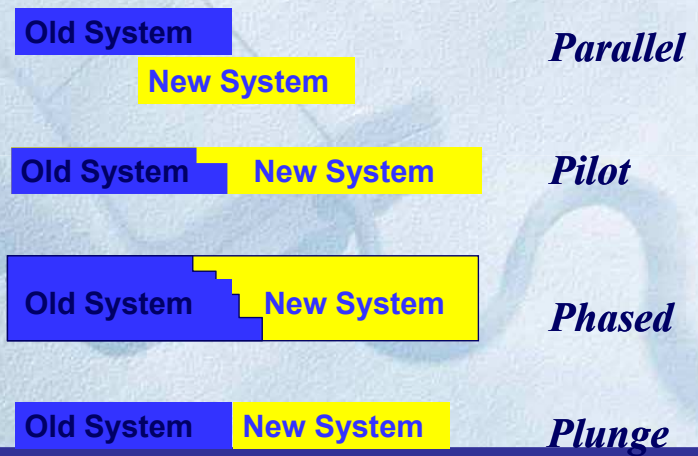
Deskripsi fungsional bisnis pengantar layanan *e-government* (Accenture 2003).



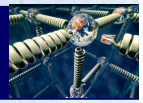
System Implementation



Methods of System Conversion

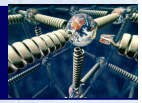


Internalisasi E-Gov



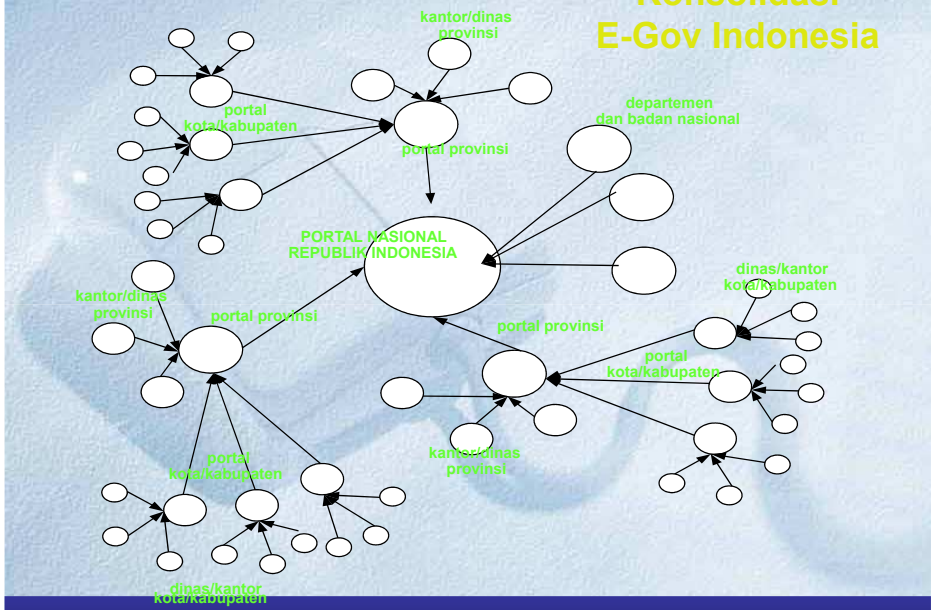
- keberlanjutan e-gov
- penguatan kebijakan dan implementasi e-gov
- mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa secara kontinyu dan progresif.
- membentuk nilai, budaya dan perilaku aparat pemerintah dan masyarakat yang sinergis

Faktor-Faktor Penghambat E-Gov

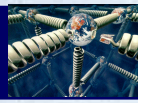


- iklim pergulatan politik
- krisis moral: korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
- krisis ekonomi
- krisis pendidikan
- krisis rasionalisasi
- krisis hukum
- keterbatasan infrastruktur e-gov
- kondisi geogafis
- heterogenitas dan ketakpercayaan masyarakat
- ancaman globalisasi

Konsolidasi E-Gov Indonesia



Misi Kementrian Kominfo



www.cahyana-ahmadjayadi.web.id

M1	Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI
M2	Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
M3	Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa
M4	Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
M5	Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global

RPJMN 2010-2014

MISI NASIONAL: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN DAYA SAING

ARAH PEMBANGUNAN
- MEMPERKUAT *VIRTUAL DOMESTIC INTERCONNECTIVITY*, melalui:
- Pengurangan kesenjangan digital dan wilayah *blank spot*
- Peningkatan ketersediaan sarana, parasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau
- Peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan

PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERCEPATAN PERLUASAN AKSES		MENDORONG PEMANFAATAN	
PENATAAN PENYELENGGARAAN MENUJU KONVERGENSI	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR YANG MENDORONG DAYA SAING	INTERNALISASI TIK DALAM PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN, SOSIAL	INOVASI DAN PENGEMBANGAN SDM TIK

ARAH KEBIJAKAN

SPM	DAYA SAING SEKTOR RIIL	KPS
(1) Pemerataan infrastruktur dan layanan infokom; (2) Pemberdayaan informasi	(1) Konvergensi; (2) Optimalisasi *resources*; (3) *Broadband*; (4) *E-government*; (5) Interoperabilitas/Intekoneksitas; (6) Inovasi TIK; (7) Peningkatan kualitas SDM TIK; (8) E-Bisnis; (9) Koordinasi *stakeholders*	(1) Peningkatan peran badan usaha; (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan

SASARAN RPJMN 2010-2014

INTERVENSI ANGGARAN

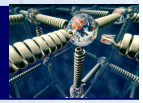
SASARAN 2010 - 2014	INDIKATOR 2010 - 2014
Tersedianya sarana dan prasarana dan layanan informasi dan komunikasi di seluruh desa, daerah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain	▪ Jangkauan layanan pos universal mencapai 100% di wilayah PSO; ▪ Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 % di Wilayah USO; ▪ Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi mencapai 100%.
Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara *online*	▪ Nilai rata-rata *e-government* instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4); ▪ Jumlah aparatur pemerintah paham TIK menjadi 80% dari total aparatur; ▪ % jumlah e-provinsi di masing-masing provinsi mencapai 100%; ▪ Tersedianya layanan publik secara *online* untuk layanan kependudukan (*e-citizen*), perizinan (*e-licensing*), dan pengadaan (*e-procurement*).

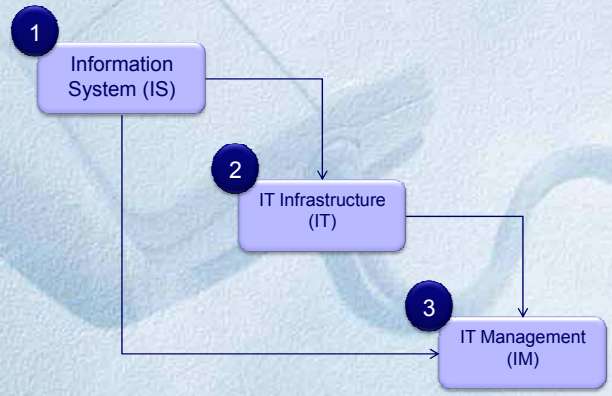
INTERVENSI REGULASI

SASARAN 2010 - 2014	INDIKATOR 2010 - 2014
Tersedianya akses informasi dan komunikasi yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital)	▪ Jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (*competition readiness index*) sekurang-kurangnya 49% dari total provinsi di Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51% indeks menengah.
Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang modern	▪ Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50%; ▪ Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30%; ▪ Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35%; ▪ Jaringan backbone telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau 100%; ▪ Jumlah ibukota kab/kota dilayani jaringan broadband sekurangnya 60% dari total ibukota kab/kota.
Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia	▪ Tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50%.
Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK	▪ % penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri mencapai 30%; ▪ % TKDN *set top box* TV digital mencapai 50%.

TERIMA KASIH

Urutan Pengembangan





Prinsip

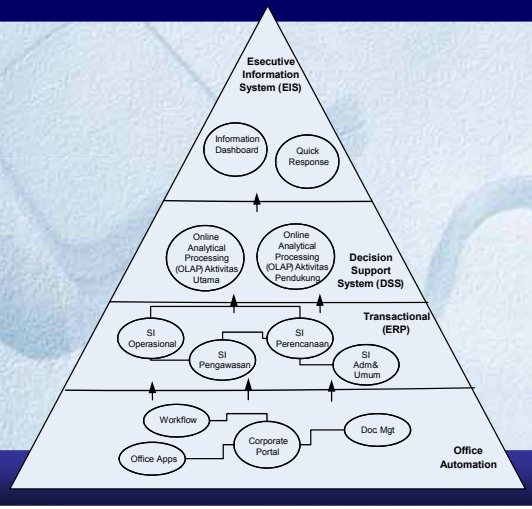




Perlunya Keselarasan domain Teknologi dg domain bisnis

- Untuk mencegah terjadinya kelebihan investasi (over investment) atau kekurangan investasi (under investment) di bidang Aset teknologi informasi
- Memperbaiki komunikasi antara domain bisnis dan domain TI
- Menselaraskan arah kebijakan TI dengan arah kebijakan Bisnis
- Perencanaan Informasi dan proses dengan efisien dan Efektif
- Optimalisasi aset TI, waktu dan biaya dari Information life cycle
- Untuk menjamin bahwa aset TI yang direncanakan dan dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi.

Level dari IS



Konsolidasi IS

